Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)

Criminological Review of the Crimethat Done by a Thug (Case Study of Batangtoru Police Section)

Marwan Busyro*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

*Corresponding Email: marwan.busyro@um-tapsel.ac.id

Diterima: Juni 2019; Disetujui: Oktober 2019; Dipublish: Oktober 2019

Abstrak

Tulisan ini akan mengenai kejahatan yang akan dilakukan preman dalam kajian kriminologis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan preman melakukan kejahatan di batangtoru dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor batangtoru terhadap preman di batangtoru. Metode penelitian ini menggunakan jenis normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan faktor penyebab preman melakukan kejahatan di batangtoru mengenai faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor minuman keras (miras). Selain itu, mengenai tindak kejahatan preman di Batangtoru seperti tersedianya waktu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, pola hidup yang konsumtif yang dibarengi dengan berkurangnya gairah kerja. Sedangkan upaya penanggulangan premanisme di Batangtoru yaitu pihak Polsek Batangtoru menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara represif. Selain dengan upaya preventif, pihak Polsek Batangtoru juga menempuh upaya represif guna menindak aksi preman yang terjadi di masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan tindakan operasi street crime dengan cara merazia dan menindak pelaku preman di masyarakat.

Kata Kunci: kriminologis, kejahatan, preman

Abstract

This paper will write about crimes committed by thugs in criminological studies. The purpose of this study are the factors that cause thugs to commit crimes in Batangtoru and head sector police made by the Batangtoru police sector against thugs in Batangtoru. The research method is normative which studies the study of documents using secondary data such as statutory regulations. Based on the results of this study found factors causing thugs to commit crimes in Batangtoru regarding environmental factors, economic factors, educational factors, alcoholic drinks (alcohol). In addition, regarding crimes of thugs in Batangtoru such as the availability of free time that cannot be used for other activities, consumptive lifestyles that are accompanied by reduced work interest or job opportunities. Whereas the efforts to overcome thuggery in Batangtoru, namely the Batangtoru Sector Police, have taken preventive and repressive measures. In addition to preventive measures, the Batangtoru Police Station also took repressive efforts to crack down on thuggery actions that occurred in the community. Repressive efforts are carried out by carrying out street crime operations by raiding and cracking down on thugs in the community.

Keyword: Criminology, crine, thugs

How to Cite: Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman Yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law*. 2 (2): 99-116

PENDAHULUAN

Tindakan penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana amanah undang-undang. Tegaknya hukum bertujuan untuk terciptanya kedamaian dan ketentraman serta cita-cita bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman. Dimana perkembangan teknologi yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan masyarakat. Pada masa perkembangan saat ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku masyarakat, maupun pergeseran budaya (*culture*) dalam masyarakat, terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Sehingga tidak hanya mengalami krisis ekonomi di masyarakat saja, namun juga berdampak pada krisis moral pada masyarakat.

Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk dapat mengakibatkan menambah jumlah pengangguran sampai didukung dengan angka kemiskinan yang semakin tinggi mengakibatkan banyak timbul kejahatan-kejahatan. Hal itu karena desakan ekonomi masyarakat, sehingga

banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini yang menimbulkan semakin tingginya angka kriminal terutama di daerah yang padat penduduknya.

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik dan aksi preman di kalangan masyarakat. Tindakan kejahatan yang dilakukan para preman memang tumbuh diberbagai aspek kehidupan manusia. Terutama di Negara Indonesia yang semakin berkembang dari sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi demikian telah dapat menambah subur nya tindakan para preman. Secara faktor sosiologis, muncul dan lahirnya preman dapat dilacak pada kesenjangan social yang terjadi dalam struktur masyarakat.

Kesenjangan ini bisa berbentuk perbedaan material dan juga ketidaksesuaian wacana dalam sebuah kelompok struktur sosial masyarakat. Masyarakat dapat dimaknai perebutan kepentingan kelompok, dimana kelompok masyarakat berharap kepentingannya menjadi sumber bagi masyarakat banyak. Perebutan kepentingan inilah telah

menimbulkan masalah, sehingga tidak terpantaunya kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Ketidakseimbangan memunculkan tindakan protes dan ketidakpuasan, kemudian berlanjut pada pergeseran kaidah individu maupun kelompok masyarakat tertentu dalam sebuah susunan masyarakat. Terbaikannya keinginan sebuah kelompok masyarakat sehingga dapat memicu timbulnya praktik preman di masyarakat. Praktik preman tidak hanya sekedar muncul dikalangan masyarakat bawah, akan tetapi juga dapat merambah ke bagian kaum masyarakat atas yang notabenenya di dominasi oleh kaum intelektual.

Sehingga banyak terjadi pada umumnya mempekerjakan bekas narapidana kelas kakap yang digunakan sebagai jaminan untuk menakuti orang lain. Di masa zaman orde baru, praktik menakuti-nakuti tidak jarang juga terjadi pada kalangan yang dianggap menghambat rencana perluasan bisnis termasuk dalam usaha property dan perkantoran. Kemudian, praktik preman dapat juga menjangkit dunia politik yang sarat akan kepentingan tertentu.

Selanjutnya, jika dikaji dalam politik bahwa tidak jarang preman dan budaya

berdiri di atas hukum malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. Dimana partai-partai politik utama di era reformasi saat ini telah memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan menakut-nakuti. Di dalam konsepnya memang kelompok barisan muda adalah bagian integral dari proses pengkaderan partai. Tetapi pada kenyataannya, tidak jarang ditujukan sebagai alat defensif yang menakut-nakuti dan bisa berubah menjadi bersifat anarkis. Selain itu juga di kalangan elit politik, budaya masyarakat berdiri diatas hukum harus sangat transparan.

Perilaku preman ditengah masyarakat pada lapisan bawah, tidak jarang pelaku kriminal tertangkap basah akan memperoleh hukuman atau sanksi. Perilaku preman merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Tindakan preman di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, selain bertindak sendiri para pelaku preman juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan preman tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan seperti pencurian dengan ancaman kekerasan diatur pada Pasal 365 KUHPidana,

pemerasan pada Pasal 368 KUHPidana, pemerkosaan diatur pada Pasal 285 KUHPidana, penganiayaan Pasal 351 KUHPidana, merusakkan barang Pasal 406 KUHPidana yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Secara umum, hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur dan melindungi kepentingan hukum Negara dan masyarakat terutama kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban hukum. (Adami Chazawi, 2002).

Praktik preman diharapkan sudah dapat diakomodir dengan melakukan penegakan hukum pidana secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun, kenyataannya masih banyak terjadi kita lihat tindakan kekerasan yang terjadi dilakukan oleh para preman tengah-tengah masyarakat. Reaksi yang seperti ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi pidana yang bersumber dari masyarakat yang sering membawa maut yang memilukan.

Perkara preman yang tidak proses melalui pengadilan, terkecuali perbuatan yang telah menimbulkan tindak pidana atau kejahatan. Preman yang disidangkan misalnya diputus pidana penjara, pidana

kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam KUHPidana atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan.

Setelah dibina, preman-preman itu dilepaskan tanpa memikirkan apa manfaat bagi mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, para preman kembali akan mengulangi perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Demikianlah tingkat pemberantasan preman di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti dan selesai. Apabila preman tersebut kembali beraksi, maka mungkin teori yang dikemukakan oleh Durkheim sangat tepat, yang menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Keadaan demikian, mendorong dilakukannya berbagai cara alternatif untuk mengatasi fenomena yang meresahkan masyarakat, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Maka, harus dicari suatu formula baru yang tepat dan dapat mengatasi atau mengantisipasi tindakan preman.

Kepolisian merupakan sebagai pengayom masyarakat yang mempunyai

peran sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap tindakan preman. Pihak kepolisian adalah penegak hukum yang dekat dengan masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengambil suatu tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena preman di masyarakat. Dengan demikian, partisipasi seluruh masyarakat tidak terlepas untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi preman yang terjadi di sekeliling mereka.

Tindakan operasi yang dilakukan pihak kepolisian untuk menindak para preman yang pada umumnya kepolisian hanya menangkap. Kemudian melepaskannya lagi tanpa mendatangkan manfaat untuk pemberantasan preman. Jadi kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib tidak dapat tercapai akibat dari pengambil kebijakan yang kurang baik dari tingkat pusat maupun di daerah.

Tindak kejahatan yang biasa dilakukan oleh preman yang terjaring oleh operasi yang biasanya jenis tindak kejahatan misalnya, melakukan penganiayaan, melakukan pencurian serta kekerasan, mabuk di muka umum atau mengganggu ketertiban umum, melakukan ancaman dengan kekerasan, mengemis di tempat umum. Kejahatan preman ini semakin marak terjadi, ditemukan

berbagai laporan dari masyarakat dengan kejahatan preman tersebut karena berbagai akibat yang ditimbulkannya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Kantor Polsek Batangtoru, dari tahun ke tahun memang kejahatan preman ini semakin bertambah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentunya terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dan dianalisis dalam tulisan ini yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan preman melakukan kejahatan di Batangtoru dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Batangtoru terhadap preman di Batangtoru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penelitian normatif yang mengkaji dengan studi dokumen yang memakai data sekunder seperti teori hukum dan buku bacaan yang relevan. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, serta studi wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti.

Analisis data adalah setelah memperoleh, baik data primer maupun data sekunder yang dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan objek penelitian, dan kemudian menghubungkan variabel yang satu dengan yang lain sehingga menarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Preman Melakukan Kejahatan Di Batangtoru

Mempelajari tentang latar belakang mengapa setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan bukanlah suatu hal yang baru. Memang secara teori atau umum faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seperti halnya pencurian, penganiayaan dan melakukan ancaman dengan kekerasan, serta mabuk-mabukan dimuka umum cukup banyak terjadi. Tetapi para Kriminolog dewasa ini agaknya lebih memungkinkan secara tegas untuk menentukan sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Sehingga untuk mengetahuinya lebih jelas harus

dicari faktor-faktor penyebabnya yang langsung berkaitan dengan kondisi dan situasi dengan masyarakat yang berhubungan erat dengan munculnya kejahatan itu. Sebagian besar preman melakukan tindak kejahatan pada waktu-waktu luang saja, karena tidak adanya kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa mereka lakukan, apalagi remaja-remaja di sebagian Batangtoru ada yang tidak bersekolah, dan adapun yang bersekolah namun setelah selesai jam belajar tersebut mereka sudah memiliki kegiatan lagi.

Berdasarkan perilaku tersebut, sehingga munculnya faktor-faktor yang pengaruhi dan menyebabkan seseorang menjadi preman melakukan tindak kejahatan, antara lain:

Faktor Lingkungan

Masalah lingkungan yang padat masyarakatnya, namun tidak tanggap mengenai masalah sosial yang timbul di dalamnya akan berakibat buruk bagi warganya. Ada beberapa masyarakat dalam memberikan informasi ataupun komunikasi antara warganya yang dilakukan justru mengarah kearah yang salah, karena banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib sehingga preman dilingkungan tersebut semakin leluasa melakukan

tindak criminal seperti, pencurian, penganiayaan, dan kejahatan lainnya.

Faktor lingkungan ini merupakan faktor terbesar banyaknya preman melakukan kejahatan di beberapa wilayah, mereka yang berinteraksi langsung dengan warga untuk melakukan tindak kejahatan sebagian besar dilakukan dengan cara berkelompok atau geng.

Menurut Sahetapy bahwa biasanya manusia bagian dari sekurang-kurangnya satu kelompok. Dalam kelompok masyarakat terdapat pikiran-pikiran tertentu mengenai norma atau tingkah laku. Selama individu itu merasa nyaman dalam sekelompoknya itu, dan berada dalam hubungan yang baik dalam kelompok itu, maka kelompok masyarakat akan menyesuaikan diri sebanyak mungkin dengan pikiran, norma atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya.

Lingkungan (tempat tinggal) preman merupakan juga faktor pendorong untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya, orang yang bergaul dengan preman pemabuk, penjudi, pencuri, suatu saat ia akan ikut pula menjadi preman. Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh dalam menempah karakter yang bersangkutan, jika lingkungan baik, maka kemungkinan perilaku seseorang

pun akan baik, tetapi kalau bergaul dengan seorang preman kemungkinan akan terpengaruh sehingga ikut menjadi preman.

Faktor Ekonomi

Preman yang melakukan tindak kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi ini biasanya dijadikan alasan pembenaran sebagai tempat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beranggapan tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan uang selain melakukan tindak kriminal seperti mencopet, memalak sebagai jalannya, memenuhi tanggungjawab keluarga berupa kebutuhan rumah tangga dan tingkat nilai barang yang terus menerus meningkat, dengan tingkat konsumtif yang tinggi pada masyarakat.

Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan kejahatan, termasuk pula mencuri, memalak agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan kejahatan akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat

pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja.

Faktor Pendidikan

Pada umumnya preman melakukan tindak kejahatan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Alasannya karena sejak kecil mereka mengenyam pendidikan rata-rata hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Hal seperti ini diakibatkan karena cara mendidik orang tua yang salah yang tidak memiliki rencana untuk anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga ada yang buta huruf, kurang fasih berbahasa Indonesia. Kemudian orang tua mereka jarang tinggal dirumah bersama keluarga untuk mendidik dan membina anak-anaknya. Oleh karena bekal pendidikan di dapat sangat kurang sebagai modal untuk bersaing mencari lapangan kerja, sehingga tidak ada jalan yang harus ditempuh selain melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, memalak.

Hubungan kejahatan yang dilakukan oleh preman dengan faktor pendidikan adalah karena apabila orang tersebut kurang mendapat pendidikan, khususnya

pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan serta dampak konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman kepada mereka mengenai dampak dan konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan oleh preman, bahwa apabila ada orang yang melakukan kejahatan seperti memalak, mencuri maka hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya khususnya norma hukum, sehingga apabila dilakukan, maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana dan akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Faktor Minuman Keras (Miras)

Minuman keras sangat besar dampaknya bagi preman yang melakukan tindak kejahatan, sebab dampak dari menenggak minuman keras (miras) membuat seseorang menjadi tidak terkontrol dan berani melakukan perbuatan nekad termasuk melakukan aksi kejahatan seperti, merampok, melakukan kekerasan, memalak, serta tidak segan-segan membuat onar di tempat umum, sehingga membuat masyarakat dirugikan.

Sekitar 70 persen tindak kriminalitas umum khususnya di Batangtoru terjadi akibat mabuk, setelah mengonsumsi minuman keras (miras). Selain itu, minuman keras (miras) juga sebagai alat memunculkan keberanian diri secara berlebihan. Banyak orang yang mengonsumsi minuman keras (miras) dikarenakan faktor tidak percaya diri, akibat pergaulan, akibat frustrasi, bahkan ada sekedar coba-coba akhirnya ketagihan. Diperkirakan 65-70 persen tindak kejahatan yang dilakukan oleh preman di Batangtoru khususnya di daerah Tapanuli Selatan di akibatkan oleh minuman keras (miras). Dengan meminum minuman keras perilaku orang tersebut mengalami perubahan ketika mabuk, misalnya orang tersebut tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan hukum.

Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Batangtoru Terhadap Preman di Batangtoru

Masalah tugas pokok Kepolisian sebagai penegak hukum, pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, yang tujuan untuk memelihara keamanan, dan ketertiban pada masyarakat. Maka permasalahan mengenai tindakan preman

yang sangat dekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kriminal. Karena kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang sedari dulu melekat dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan upaya hukum termasuk hukum pidana merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum itu sendiri. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sehingga kebijakan tindakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan hukum. Maka menggunakan hukum pidana sebenarnya merupakan keharusan. (Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005)

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibidang pemberantasan preman yaitu dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari

kebijakan suatu yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana yang khususnya pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu yaitu berupa *social welfare* dan *social defence*. (Barda Nawawi Arief, 2007)

Salah satu bagian dari kebijakan sosial adalah kebijakan penegakan hukum, termasuk di dalamnya kebijakan legislatif. Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Suatu kebijakan penegakan hukum harus melihat kajian yang luas dalam susunan suatu sistem hukum itu sendiri.

Upaya penanggulangan preman pihak kepolisian khususnya Polsek Batangtoru menempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.

Upaya Penanggulangan Secara Preventif (pencegahan)

Penanggulangan preman secara preventif pihak Polsek Batangtoru di batangtoru telah mengadakan upaya

penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan upaya penyuluhan hukum ini diimplementasikan bekerja sama dengan Pemerintah Batangtoru dan instansi terkait.

Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan rasa kesadaran hukum kepada masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan regulasi kepada masyarakat dalam suasana formal dan informal, sehingga menghasilkan terciptanya sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui masyarakat juga dapat memahami, menghayati hukum dan masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. Eksistensi penyuluhan hukum sangat diperlukan untuk saat ini, meskipun sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui, memahami apa yang menjadi kewajiban dan haknya menurut ketentuan hukum. Namun, masih ada masyarakat yang belum mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Konsep upaya penyuluhan hukum pada masyarakat saat ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Sasaran dari penyuluhan hukum itu sendiri adalah masyarakat, yang

diharapkan tidak saja mengerti akan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi juga diharapkan mengerti hak yang miliknya. Kesadaran akan hak yang dimiliki masyarakat akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Karena itu mereka perlu mendapat penyuluhan hukum agar tahu bahwa hukum memberikan faedah perlindungan hukum dan memajukan kesejahteraan. Dimana mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut.

Eksistensi penyuluhan inni juga sangat berkaitan dengan materi hukum yang diusulkan. Banyak materi hukum yang diusulkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang menjadi tujuan penyuluhan hukum. Materi hukum yang selama ini kurang memberikan manfaat bagi penyelesaian masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. Materi hukum yang disurukan seharusnya tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan tingkat pusat saja tetapi juga peraturan-peraturan di daerah. Peraturan perundang-undangan yang disurukan

bukan hanya untuk kepentingan negara tetapi juga merupakan kebutuhan masyarakat setempat yang diperoleh dari hasil evaluasi dan peta permasalahan hukum di daerah-daerah.

Hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan preman itu sendiri. Masyarakat dianggap mempunyai peran penting dalam pengungkapan terjadinya aksi preman yang terjadi di sekitar mereka. Kebanyakan aksi preman yang ditangani oleh Polsek batangtoru dapat terungkap setelah ada pengaduan dari masyarakat. Perlu peran dan kerjasama dengan masyarakat secara bersama, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas mental masyarakat. Dengan mental individu masyarakat yang baik, maka diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat yang kondusif, sehingga dapat menekan rendahnya angka kriminalitas termasuk pula menekan terjadinya aksi preman di masyarakat.

Upaya penanggulangan premanisme, upaya preventif (pencegahan) dirasa memiliki peran yang sangat cukup penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada upaya pencegahan

sebelum praktik premanisme terjadi adalah sebagai berikut:

Tindakan pencegahan kejahatan lebih bermanfaat daripada tindakan represif. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit atau birokrasi, yang dimana dapat menjurus ke arah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Upaya pencegahan lebih praktis bila dibandingkan usaha represif dan rehabilitasi (perbaikan). Untuk menghadapi jumlah orang yang lebih besar jumlahnya, tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Upaya pencegahan dapat juga dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri, tanpa selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi (perbaikan). Contohnya, tindakan menjaga diri sendiri agar jangan sampai menjadi korban aksi preman, atau tindak kejahatan yang lain.

Upaya pencegahan tidak perlu menimbulkan pandangan yang negatif, misalnya pemberian tanda cap pada pelaku preman sedang di hukum atau dibina, pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, dan permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke

arah residiv. Viktimisasi struktural merupakan penimbunan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya tindakan pencegahan tersebut, misalnya korban atas suatu sistem hukuman atau peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan sosial..

Upaya pencegahan selain itu dapat juga memperkuat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap anggota masyarakat. Dengan demikian, upaya tindakan pencegahan dapat membantu mengembangkan orang bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional demi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Upaya pencegahan tindakan kriminal dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan fisik, mental dan sosial seseorang. Ada tiga metode pendekatan yang bisa diterapkan untuk menanggulangi masalah preman di masyarakat yaitu:

Pendekatan keagamaan, metode ini dilakukan dengan memberikan ilmu pemahaman kepada preman tentang apa arti dan tujuan hidup dalam ajaran agama

untuk menuju kehidupan yang aman, damai, dan beriman.

Pendekatan kemanusiaan, upaya ini para pelaku preman harus diperlakukan dengan baik, penuh kasih sayang dalam artian mereka tidak diperlakukan secara kasar dan tidak bernilai.

Pendekatan ekonomi, preman harus diberdayakan dengan memberikan keterampilan untuk kemudian memiliki sumber mata pencarian yang dapat menghidupi keluarga mereka.

Adapun upaya menanggulangi bahaya miras, upaya dengan cara preventif, disinilah kontribusi penting orang tua dan keluarga dalam melakukan pengawasan dan control pada anak atau anggota keluarganya. Ilmu pengetahuan pendidikan agama sejak dini sangat penting, tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai minuman keras adalah sesuatu minuman yang haram dan dilarang untuk dikonsumsi. Pembinaan dalam rumah tangga untuk mencapai keharmonisan dengan penuh perhatian dan kasih sayang akan menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sehingga orang tua akan lebih mudah untuk memantau dan mengawasi perilaku serta pergaulan anak tersebut agar tidak menjurus ke perilaku yang bersifat negative atau tidak. Setiap

struktur dalam keluarga juga harus lebih sering menasehati, mengingatkan dengan lemah lembut tentang bahaya minuman keras (beralkohol). Jangan pula memakai tindakan kekerasan, mengejek atau memarahi dalam mendidik anak.

Upaya Penanggulangan Secara Represif (penindakan)

Untuk mengatasi masalah premanisme, selain tindakan preventif, dapat pula diadakan tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi. Ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi yaitu pertama, menciptakan sistem dan program yang bertujuan untuk menghukum orang yang berperilaku preman. Program ini bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan dan hukuman penjara. Teknik kedua, lebih menekankan pada usaha agar dapat berubah perilaku menjadi orang biasa. Dalam pembinaan ini berupa psikologis dan penyadaran disertai latihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar punya modal untuk mencari pekerjaan.

Kemudian, selain menjalankan upaya penanggulangan preman secara preventif, maka pihak Polsek Batangtoru juga menempuh melalui upaya represif. Upaya represif yang dilakukan mempunyai tujuan untuk menanggulangi tindakan

preman yang sudah terjadi di masyarakat. Hal ini, untuk memberikan efek jera kepada pelaku preman. Dalam upaya secara represif pihak Polsek Batangtoru melaksanakan operasi khusus dengan sandi "Operasi *Street Crime*" yang pelaksanaannya telah diatur secara terstruktur oleh Polri. Polsek Batangtoru melakukan penindakan upaya hukum terhadap aksi-aksi preman, baik preman individu, preman kelompok maupun terhadap preman aparat. Penindakan hukum yang dimaksud adalah dengan melakukan razia secara terstruktur dan penangkapan terhadap pelaku preman yang terjaring dalam razia.

Razia merupakan tindakan yang secara serentak dilakukan di beberapa daerah. Merazia premanisme yang digelar oleh jajaran polisi dilakukan untuk mengurangi dan menekan tindak kriminal yang dilakukan preman, dan juga membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Razia terhadap preman-preman dilakukan disetiap titik dimana menurut laporan masyarakat di daerah tersebut banyak dijumpai preman-preman yang meresahkan masyarakat. Tempat-tempat tersebut antara lain di terminal-terminal, pasar-pasar, dan tempat umum lainnya. Pihak Polsek Tamalanrea beserta jajarannya menangkap semua preman

yang berada ditempat-tempat tersebut dan membawanya untuk kemudian diperiksa apakah mereka terkait tindak kejahatan atau tidak, jika mereka terkait maka mereka akan ditahan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut dan jika tidak mereka akan dibawa ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan binaan.

Dengan operasi seperti ini diharapkan apa yang menjadi tujuan dari operasi juga membuat masyarakat atau warga menjadi aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat yang tidak merasa aman, nyaman dengan banyak terjadinya pemalakan atau perampasan, penodongan, pencopetan, dan lain sebagainya. Hal ini banyak terjadi ditempat-tempat umum seperti di jalan raya, diangkutan-angkutan umum, terminal, dan pasar serta tempat lainnya.

Tentu ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum semata. Semua individu mempunyai kewajiban hukum untuk mencegah timbulnya premanisme, lantaran begitu luasnya efek tindakan premanisme tersebut. Tangan polisi tidak mampu menjangkau semuanya tanpa partisipasi masyarakat. Secara nyata tindakan preman tidak kalah berbahaya dengan premanisme menunjuk pada sikap, pemahaman ideologi, tindakan yang dilakukan seseorang layaknya

perilaku seorang preman. Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan premanisme oleh Polsek Batangtoru tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala, kendala-kendala tersebut antara lain:

Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme takutnya masyarakat terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat harus merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya.

Sulitnya mendeteksi tindakan preman yang disebabkan oleh minimnya informasi tentang aksi premanisme yang dilindungi oleh oknum-oknum tertentu yang notabenenya juga berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Terkait informasi mengenai jaringan premanisme aparat penegak hukum sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut mengenai tindakan premanisme tersebut.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan

perlindungan masyarakat (*social defence*). Aspek (*social welfare*) dan (*social defence*) yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Apabila dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpena” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan yaitu bersifat fragmentaris, simplistis atau tidak struktural fungsional, simptomatik/tidak kausatif atau tidak eliminatif, dan bersifat represif atau tidak preventif serta harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap formulasi (kebijakan legislatif).

Tahap aplikasi (kebijakan yudisial).

Tahap eksekusi (administratif).

Berdasarkan adanya tahap formulasi tersebut, maka upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan bukan saja

tugas aparat penegak hukum, namun juga tugas aparat pembuat hukum itu sendiri yaitu aparat legislatif, dan bahkan kebijakan lembaga legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan lembaga legislatif salah satu kesalahan dalam membuat strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan pada tahapan aplikasi dan eksekusi kepada kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 2007)

Penetapan jenis pidana oleh pembuat Undang-Undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Di samping ini, dimaksudkan pula untuk membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan itu. Mereka tidak boleh menggunakan sarana pidana yang tidak lebih dahulu ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang. Dengan demikian, jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang mengikat dan membatasi para penegak hukum lainnya. (Barda Nawawi Arief, 2007)

Hukum merupakan sistem atau rangkaian peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku setiap orang

sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum itu sendiri. (Wirjono Prodjodikoro, 2008). Sedangkan sebagian sarjana hukum mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakuti orang banyak maupun secara menakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.

Untuk mendidik atau memperbaiki setiap orang yang sudah terbiasa melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. (Wirjono Prodjodikoro, 2008)

Aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, yaitu antara lain:

Untuk memelihara/menyelamatkan masyarakat dari akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan tindak pidana dia

akan menerima balasan atau nestapa sesuai dengan perbuatannya. Sehingga diharapkan pelaku dapat merasakan efek jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Selain itu, efek kepada orang lain juga tidak akan berani meniru perbuatan pelaku atas tindak pidana, sebab akibat yang sama juga akan dialaminya.

Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar orang lain menjadi baik dan anggota masyarakat pun akan baik pula.

Hukuman sebagai balasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Secara tegas, bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana dilakukan untuk memperbaiki dan menyadarkan agar semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjahui setiap perbuatan jelek yang dilarang dalam undang-undang serta mengetahui kewajiban dirinya sehingga dapat menghargai hak orang lain. Kemudian apa yang dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. (Topo Santoso, 2003)

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan preman di Batangtoru ini secara umum disebabkan beberapa faktor antara lain faktor lingkungan setempat, faktor ekonomi, faktor pendidikan masih rendah, faktor minuman keras (minuman beralkohol). Selain itu juga ditemukan beberapa alasan mengenai tindak kejahatan preman di Batangtoru antara lain; tersediannya waktu luang yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, pola hidup yang konsumtif yang dibarengi dengan berkurangnya gairah kerja atau kesempatan kerja, sehingga begitu banyak waktu luang untuk melakukan tindak kejahatan. Upaya penanggulangan premanisme di Batangtoru, pihak Polsek Batangtoru menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, tujuan dari penyuluhan hukum tersebut untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui bahwa hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan premanisme. Selain

dengan upaya preventif, pihak Polsek Batangtoru juga menempuh upaya represif untuk menindak para premanisme yang terjadi di masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan melaksanakan operasi *street crime* dengan cara merazia dan menindak para pelaku premanisme di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2008), Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, (2008), Kekerasan Terhadap Perempuan, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- J. Suprpto, (2007), Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung. L, (2005), Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, (2002), Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, (2005), Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, P.T Alumni, Bandung.
- R.Soesilo, (1979), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor
- Topo Santoso, (2003), Membumikan Hukum Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, (2008), Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2008,
- Sudjana, (2008), Metodologi Penelitian, Sinar Grafindo, Grafindo, Jakarta